



SIARAN PERS
Nomor HM.00/PENG-03/SU04/3/2024
Tanggal 29 Januari 2024

Hasil Pengawasan BPKP Sepanjang Tahun 2023 Sebesar Rp67,09 Triliun

Jakarta - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berkontribusi positif terhadap keuangan negara sebesar Rp67,09 triliun sepanjang 2023. Hasil tersebut merupakan kinerja pengawasan dari pelbagai aspek seperti Proyek Strategis Nasional (PSN), pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh merinci, kontribusi itu terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama adalah efisiensi belanja negara atau penghematan sebesar Rp15,56 triliun. Menurutnya, efisiensi belanja adalah uang yang belum keluar, sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran negara. "Kenapa kita bilang ini efisiensi, ini kan uangnya belum keluar. Mau keluar tapi kami cegah. Uang ini belum keluar dan berhasil kita selamatkan," katanya.

Kontribusi yang kedua kata Ateh, berasal dari penyelamatan uang yang sudah keluar. Jumlahnya Rp21,90 triliun. "Ini hasil audit investigasi sebesar Rp21,90 triliun. Kalau tadi uangnya belum keluar, yang ini sudah keluar. Jadi kita usahakan supaya uang tersebut bisa dikembalikan ke kas negara," tuturnya.

Yang ketiga berasal dari optimalisasi potensi penerimaan negara/daerah, dengan jumlah Rp29,3 triliun. "Artinya kita mengidentifikasi potensi-potensi penerimaan yang masih bisa digali dan dioptimalkan dari sektor Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jadi negara bisa dapat tambahan penerimaan sebesar Rp29,3 triliun," ujarnya.

Ateh menjelaskan, pengawasan BPKP sangat luas, mencakup 86 Kementerian/Lembaga, 542 Pemda, dan 27.190 desa. Selain itu, BPKP juga mengawasi 211 PSN, 326 proyek pembangunan lainnya, 114 BUMN termasuk anak perusahaannya, dan banyak lainnya.

"Tahun 2023 BPKP melakukan sebanyak 20.783 kegiatan pengawasan yang terbagi menjadi 16.471 kegiatan assurance seperti audit, reviu, evaluasi, dan monitoring. Sisanya sebanyak 4.312 merupakan kegiatan consulting yang menyoroti perbaikan tata kelola dan pengelolaan keuangan negara," ucapnya.

Ateh menambahkan, untuk tahun 2024 BPKP juga telah menyusun Agenda Prioritas Pengawasan (APP) untuk menjaga akuntabilitas dan tata kelola pemerintah pusat maupun daerah.

Dijelaskan Ateh, APP 2024 mengusung tema Independen Mengawasi, Pembangunan Terakselerasi, sebagai bentuk gambaran produk pengawasan yang akan BPKP hasilkan selaku auditor presiden yang profesional dan responsif dalam mengawal kebutuhan negara.

"APP 2024 fokus pada 7 sektor strategis pembangunan yang dijabarkan dalam 25 tema dan 86 topik prioritas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional," tambahnya.

Selain itu, di tahun ini pelaksanaan pengawasan BPKP akan mengedepankan kecepatan, memastikan ketepatan waktu, mengutamakan pencegahan kebocoran dan menghadirkan layanan pengawasan intern pemerintah yang berkualitas dan bermanfaat.

Narahubung Media:

Gunawan Wibisono

Juru Bicara BPKP

M: 0882221224490 // W: www.bpkp.go.id